BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN BONDOWOSO PERTANIAN ORGANIK
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Bondowoso dalam mendukung ketahanan pangan nasional, perlu dilakukan perbaikan terhadap struktur tanah dengan meningkatkan bahan organik ke dalam tanah melalui pemberian pupuk organik;

b. bahwa agar petani di Kabupaten Bondowoso dapat menggunakan dan memanfaatkan pupuk organik secara luas dan optimal, perlu diselenggarakan gerakan pemanaftan pupuk organik melalui Gerakan Bondowoso Pertanian Organik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk memberikan arahan yang jelas dan tepat dalam penyelenggaraan Gerakan Botani, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Bondowoso Pertanian Organik Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang...

<table>
<thead>
<tr>
<th>PARAF KOORDINASI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kabag Hukum</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

13. Undang-Undang...

<table>
<thead>
<tr>
<th>PARAF KOORDINASI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kabag Hukum</td>
</tr>
<tr>
<td>Kabag Perekonomian</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Ketapang</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Diperta</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Pengairan</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Disnakkhan</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Diskoperindag</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Disnubun</td>
</tr>
</tbody>
</table>
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Penggunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

22. Peraturan...
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:....

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabag Hukum</th>
<th>Kabag Perekonomian</th>
<th>Kepala Kejatiang</th>
<th>Kepala Diperta</th>
<th>Kepala Pengairan</th>
<th>Kepala Disnakkan</th>
<th>Kepala Diskoperindag</th>
<th>Kepala Disutuhun</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN BONDOWoso PERTANIAN ORGANIK TAHUN 2016.

Pasal 1


Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso guna terwujudnya partisipasi masyarakat dan keberhasilan produksi pangan di Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2016.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 20 April 2011

BUPATI BONDOWoso,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWoso,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWoso TAHUN 2016 NOMOR 24

<table>
<thead>
<tr>
<th>PARAF KOORDINASI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kabag Hukum</td>
</tr>
<tr>
<td>Kabag Perekonomian</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Ketapang</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Diperaga</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Pengairan</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Disnakan</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Deskoperindag</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Dibtabun</td>
</tr>
</tbody>
</table>
AMIN SADI HUSNI
Bupati Bondowoso

BANK GERAKAN BONDOWOSO
PERTANIAN ORGANIK

TAGAH: 2106
BANK GERAKAN BONDOWOSO
PERTANIAN PELAKSANAAN GERAKAN
TENTANG
NOMOR: 2106
PETUNJUK BUPATIN BONDOWOSO
LAMPIRAN III
# Lampiran V

**Peraturan Bupati Bondowoso**

*NOMOR 24 TAHUN 2016*

**Tentang**

*PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN BONDOWOSO PERTANIAN ORGANIK TAHUN 2016*

## Perkembangan Penggunaan Pupuk Organik

Dalam Rangka Gerakan Bondowoso Pertanian Organik (Botani)

Kabupaten Bondowoso

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kecamatan</th>
<th>:</th>
<th>Komoditas</th>
<th>:</th>
<th>Bulan</th>
<th>Tahun</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Desa</th>
<th>Luas Area Tanam (Ha)</th>
<th>Sasaran Area</th>
<th>Penggunaan Pupuk Organik (Ha)</th>
<th>% (kolom 10.7)</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>JUMLAH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bondowoso,...........................................

CAMAT .............................................

BUPATI BONDOWOSO, ................................

AMIN SAID HUSNI ......................................
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN BONDOWOSO
PERTANIAN ORGANIK TAHUN 2016

Perkembangan Penggunaan Pupuk Organik
Dalam Rangka Gerakan Bondowoso Pertanian Organik (Botanik)
Kabupaten Bondowoso

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Desa</th>
<th>Luas Area Tanam (Ha)</th>
<th>Sasaran</th>
<th>s/d bln lalu</th>
<th>Bulan ini</th>
<th>s/d bln ini</th>
<th>Penggunaan Pupuk Organik (Ha)</th>
<th>s/d bln lalu</th>
<th>Bulan ini</th>
<th>s/d bln ini</th>
<th>% (kolom 10:7)</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH

Bondowoso, ...........................................

DESA ............................................

..................................................

BUPATI BONDOWOSO,

[Signature]

[Signature]

AMIN SAID HUSNI
1. Lahan pertanian minima bahagian organi.
2. Sumbaddaya manusia pertanian.
C. Sasaran

B. Tujuan

Pengetahuan pungkor bertujuan.

(Continued on the next page)
D. Lokasi Kegiatan
Lokasi yang menjadi sasaran kegiatan adalah 209 Desa dan 10 Kelurahan di 23 Kecamatan.

II. GAMBARAN UMUM KEGIATAN
Tahapan pertanian organik di Kabupaten Bondowoso diimplementasikan menjadi 3 (tiga) tahap:

A. Tahap Pertama
1. Men sosialisasikan dan menggerakkan pembuatan dan penggunaan pupuk organik.
2. Menggunakan pupuk anorganik secara rasional.
3. Meningkatkan produktivitas.

B. Tahap Kedua
1. Menggerakkan penggunaan pestisida nabati, agensia hayati dan musuh alami.
2. Meningkatkan penggunaan pupuk organik.
4. Meningkatkan kualitas produk pertanian.

C. Tahap Ketiga
Menghasilkan produk pertanian organik dengan:
1. Menjaga kualitas pasokan air irigasi.
2. Memfasilitasi sertifikasi produk yang dihasilkan pada lembaga sertifikasi yang berkompeten.

ROAD MAP
PELAKSANAAN PERTANIAN ORGANIK
KABUPATEN BONDOWOSO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Sosialisasi pembuatan dan penggunaan pupuk organik</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penggunaan pestisida nabati dan perluasan cluster</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Branding/sertifikasi produk dan fasilitasi pemasaran produk organik</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

III. KEGIATAN POKOK TAHUN 2016

A. Kegiatan Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik (SLPPO)
1. Latar Belakang
   Pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan harus terus digalakkan agar kegiatan usaha tani senantiasa menguntungkan, lestari dan tetap ramah lingkungan. Peningkatan derajat kesuburan tanah melalui penerapan sistem pertanian berbasis organik secara
terpadu memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antararantutan produktivitas pertanian dan perbaikan kualitas lahan.

Pertanian padi konvensional/kimia memberi dampak nyata pada penurunan kandungan bahan organik tanah, perubahan sifat fisik, kimia dan biologis lahan yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas lahan. Disamping itu, penggunaan pupuk dan pestisida kimia/anorganik berdampak nyata pada penurunan kualitas kesehatan manusia akibat residu kimia berbahaya yang tertinggal pada bahan pangan yang dikonsumsi.

Peningkatan pendidikan dan pendapatan masyarakat mempengaruhi kesadaran masyarakat akan produk pangan sehat dan meningkatkan permintaan terhadap produk pangan organik. Hal tersebut memberi dampak positif terhadap permintaan produk organik termasuk beras organik.

Oleh karena itu untuk meningkatkan derajat kesuburan lahan, dan meningkatkan kesadaran dan keterampilan petani dalam penggunaan saprodi organik, maka perlu dilakukan program terpadu dan berkelanjutan. Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik (SLPPO) merupakan program terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan standarisasi dan produksi komoditas agro organik, terutama beras organik. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah SLPPO dengan menerapkan satu teknologi yang diimplementasikan secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan untuk tanaman, tanah dan air berbasis teknologi Sustainable Organic Farming (SOF).

2. Tujuan
   a. Meningkatkan keterampilan petani untuk berbudidaya padi secara organik melalui penerapan paket teknologi pertanian organik secara optimal
   b. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani
   c. Merealisasikan lahan dan produk organik yang tersertifikasi
   d. Menumbuhkembangkan klaster organik.

3. Sasaran
   a. Lahan pertanian kritis bahan organik
   b. Lahan pertanian minim pencemaran
   c. Sumber Daya Manusia pertanian.

4. Input
   Tersedianya dana APBD Kabupaten Bondowoso bagi pelaksanaan kegiatan.

5. Output
   Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sekolah lapang pengembangan pupuk organik (SLPPO) dan dihasilkannya produk beras organik tersertifikasi.

6. Outcome
   a. Perbaikan kualitas lahan pertanian secara berkelanjutan.
   b. Tersedianya produk pangan organik yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
c. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian yang akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

B. Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura

1. Latar Belakang

Usaha agribisnis hortikultura menuntut dipenuhinya berbagai persyaratan agar diperoleh efisiensi usaha produksi yang tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan yang optimal, dan produksi yang berkelanjutan serta sumber daya alam pertanian yang lestari. Menghadapi persaingan dalam era globalisasi sekarang ini, petani dan pelaku usaha agribisnis hortikultura dituntut mau dan mampu menerapkan teknologi produksi secara benar. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang aman konsumsi, bermutu tinggi dan kontinuitas jumlah produk sesuai permintaan pasar. Oleh karena itu perlu dikembangkan produk hortikultura yang berorientasi pada pengembangan kawasan dan menerapkan GAP sesuai Permentan Nomor: 48/Permentan/OT.140/ 10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik.

Sesuai kondisi dan potensi produk hortikultura di Kabupaten Bondowoso, serta dalam rangka menunjang terwujudnya kawasan agribisnis hortikultura, maka beberapa komoditas utama Bondowoso seperti Buah-buahan (Mangga, Durian, Manggis, Pisang, Apokad), Sayuran (Tomat, Cabai, Kentang, Bawang Merah, Kubis), dan tanaman obat (Jahe, Kunyit, Temulawak) sangat memungkinkan untuk lebih dikembangkan secara intensif di beberapa wilayah kecamatan.

Sejalan dengan kebijakan pengembangan hortikultura, pengembangan komoditas tidak lagi merujuk pada komoditas unggulan daerah, tetapi pengembangan diarahkan dalam satu kawasan yaitu kawasan pengembangan sentra hortikultura. Sehingga pemilihan komoditas didasarkan pada asumsi potensi wilayah yang sama dalam satu kawasan. Dengan terwujudnya kawasan pengembangan sentra hortikultura maka seluruh aktivitas agribisnis dapat berjalan dengan baik mulai dari hulu sampai dengan hilir.


2. Tujuan

a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan dan sentra produksi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman obat yang berkelanjutan, dengan selalu meningkatkan penggunaan pupuk organik.

b. Mendorong petani untuk selalu menerapkan Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practise (GHP), dan Standard Operasional Prosedur (SOP).
c. Menghasilkan produk yang aman konsumsi, bermutu tinggi sesuai perminaan pasar serta jumlah produk yang terjamin kontinuitasnya.

3. Sasaran
   b. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura melalui penerapan GAP dan SOP.
   c. Meningkatnya jumlah registrasi lahan usaha tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat yang menerapkan GAP/SOP.

4. Input
   Tersedianya dana APBD Kabupaten Bondowoso bagi pelaksanaan kegiatan dan sumber daya manusia.

5. Output
   c. Terlaksananya registrasi lahan usaha pada lokasi kawasan tanaman buah, sayuran dan tanaman obat.
   d. Terlaksananya kegiatan pembinaan untuk pengembangan kawasan agribisnis hortikultura.

6. Outcome
   a. Terlaksananya koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan pengembangan kawasan agribisnis hortikultura.
   b. Terfasilitasinya pertemuan-pertemuan dalam rangka mewujudkan kawasan agribisnis hortikultura.
   c. Tersedianya lahan usaha petani di kawasan agribisnis yang telah menerapkan budidaya tanaman hortikultura yang baik sesuai prinsip-prinsip GAP.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

C. Pengembangan Kawasan Agropolitan

1. Latar Belakang
   Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

   Dalam mempercepat pembangunan di pedesaan yang benuansa pertanian diperlukan komitmen dan tanggung jawab moral pembangunan dari segenap aparatur pemerintah, masyarakat maupun swasta sehingga pembangunan pertanian dapat dilakukan secara efektif, efisien, terintegrasasi dan sinergis dengan pembangunan sektor lainnya (terpadu) serta berwawasan lingkungan. Kawasan pedesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan
pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota dan mempunyai hubungan yang bersifat interdependensi/timbal balik yang dinamis terutama untuk kawasan yang mempunyai produk unggulan perlu ditumbuhkembangkan menjadi kawasan agrobisnis dalam satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Inti dari program pengembangan kawasan agropolitan adalah gerakan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Oleh karena ituarah pembangunan kawasan agropolitan adalah mengutamakan tumbuh kembangnya sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkualitas, yang dinamis dan didukung dengan mensinergikan program pemerintah dengan partisipatif masyarakat.

Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bondowoso akan memberikan dukungan positif terhadap agenda penanggulangan kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan memacu kewirausahaan. Selain itu juga memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang.


2. Tujuan
   a. Mendorong berkembangnya sistem dan usaha agrobisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan di kawasan agropolitan.
   b. Menghasilkan produk yang aman konsumsi, dengan mengembangkan budidaya tanaman ramah lingkungan sesuai prinsip organik.

3. Sasaran
   Terlaksananya pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan petani, pengembangan kelembagaan sistem agrobisnis, dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu, di Kecamatan Sukosari, Sumber Wringin, Sempol, dan Tlogosari, dalam mewujudkan kawasan agropolitan di Kabupaten Bondowoso.

4. Input
   Tersedianya dana APBD Kabupaten Bondowoso bagi pelaksanaan kegiatan dan sumber daya manusia.

5. Output

6. Outcome
   a. Berkembangnya agrobisnis hortikultura di kawasan agropolitan, yaitu di Kecamatan Sukosari, Sumber Wringin, Sempol, dan Tlogosari.
   b. Terwujudnya kawasan Agropolitan di Kabupaten Bondowoso.
7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

D. Pengembangan Agribisnis Biofarmaka

1. Latar Belakang
   Potensi dan prospek pengembangan tanaman obat atau biofarmaka secara nasional cukup baik untuk dikembangkan, bahkan di Kabupaten Bondowoso potensi dan prospek pengembangan tanaman biofarmaka juga mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari segi minat petani, maupun peluang pasarnya. Permintaan produk biofarmaka yang cenderung selalu meningkat menjadi alasan pengembangan tanaman biofarmaka untuk terus dilakukan. Pola hidup sehat masyarakat yang sudah mulai beralih dari obat-obatan kimia ke pada konsumsi produk alami (back to nature) juga mendorong peningkatan produksi tanaman obat. Selain bahan obat herbal/jamu, tanaman obat seperti jahe, kunyit,dll, juga dipergunakan sebagai bahan bumbu, bahan tambahan pada makanan dan bahan dasar pada minuman. Secara agroklimat Indonesia mempunyai kecocokan untuk pengembangan tanaman Biofarmaka, Indonesia juga mempunyai keragaman varietas tanaman biofarmaka yang cukup besar.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pengembangan tanaman biofarmaka belum pernah dilakukan secara khusus dengan penyediaan anggaran tersendiri, melainkan untuk pengembangan Biofarmaka masih disisipkan pada kegiatan-kegiatan lainnya.

Upaya awal dari rencana pengembangan tanaman biofarmaka di kabupaten Bondowoso, yang harus dilakukan adalah pembekalan dan pembinaan teknis kepada petani, tetang budidaya tanaman biofarmaka yang baik dan benar, untuk menghasilkan produk yang baik mutu dan produktivitasnya.


2. Tujuan
   a. Petani mempunyai pengetahuan teknis dan keterampilan budidaya tanaman biofarmaka yang baik untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman biofarmaka di Kabupaten Bondowoso, dengan selalu meningkatkan penggunaan pupuk organik.
   b. Petani mampu memasarkan produk biofarmaka baik dalam bentuk segar maupun simplisia.

3. Sasaran
   a. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta motivasi petani untuk mengembangkan tanaman biofarmaka di wilayah Kecamatan Cermee.
   b. Terbangunnya pengembangan kawasan hortikultura khususnya tanaman biofarmaka di wilayah Kecamatan Cermee.

4. Input
   Tersedianya dana APBD Kabupaten Bondowoso bagi pelaksanaan kegiatan dan sumber daya manusia.
5. Output
Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Tanaman Biofarmakadi wilayah Kecamatan Cermee.

6. Outcome
a. Meningkatnya luasan kawasan, produksi, dan produktivitas tanaman biofarmaka di wilayah Kecamatan Cermee.

b. Tersedianya produk tanaman biofarmaka di wilayah Kecamatan Cermee yang siap dipasarkan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun ekspor.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

E. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

1. Latar Belakang
Lahan pekarangan merupakan areal yang potensial untuk pengembangan hortikultura dengan tanaman sayuran, buah-buahan dan biofarmaka yang dapat menjadi sumber penghasil bahan makanan bernilai gizi dan bernilai ekonomi tinggi. Sejauh ini sebagian besar lahan pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga hasilnya kurang dapat dirasakan.

Ditinjau dari potensi lahan dan adanya kemauan yang cukup tinggi dari masyarakat khususnya kaum wanita, masih terbuka peluang untuk meningkatkan optimalisasi lahan pekarangan dengan tanaman hortikultura. Keadaan ini sangat menguntungkan dan perlu dukungan dari semua pihak agar dapat diperoleh hasil yang maksimal mengingat akhir-akhir ini sering terjadi lonjakan harga komoditas sayuran akibat adanya fenomena anomali iklim yang menyebabkan gangguan produksi atau gagal panen di lahan konvensional (sawah/tegal). Sejalan dengan kondisi tersebut maka kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan perlu terus didorong dan dimasyarakatkan dengan baik sebagai alternatif budidaya di lahan sempit yang relatif tak banyak menghadapi kendala iklim.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah pekarangan atau lahan-sempit yang ada di lingkungan pemukiman penduduk baik di desa maupun di perkotaan. Kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan melibatkan kelompok wanita tani, ibu-ibu pengurus PKK, Dasawisma, dan Posyandu. Teknis budidaya yang dilakukan adalah dengan penanaman tanaman buah, tanaman sayuran, dan tanaman biofarmaka atau Tanaman Obat Keluarga (TOGA), di lahan pekarangan sehingga lahan pekarangan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan berbagai tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi (buah, sayur, dan tanaman obat) dalam pelengkapan gizi keluarga serta sumber pendapatan untuk menunjang ekonomi rumah tangga.

Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat diciptakan peluangpenyediaan pangan, gizi dan kesehatan untuk masing-masing keluarga, serta mendukung Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Bondowoso, yang pada akhirnya juga mendukung terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka melalui anggaran APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2016, perlu dilaksanakan

2. Tujuan
a. Adanya optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan gizi dan kesehatan keluargasehata menambah pendapatan sekaligus ikut menjaga/memelihara kelestarian dan estetika lingkungan.
b. Penggunaan pupuk organik bagi tanaman pekarangan guna mendapatkan produk yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi.
c. Adanya motivasi sekaligus menggerakkan upaya penyediaan buah-buahan/sayuran/tanaman obat keluarga secara swadaya.

3. Sasaran
a. Terbanguannya pengembangan kawasan hortikultura melalui Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dengan selalu meningkatkan penggunaan pupuk organik.
b. Adanya penumbuhan dan penguatan kelembagaan Kelompok Pemanfaatan Pekarangan seperti KWT dan PKK yang digerakkan oleh tenaga pendamping (Mantri Tani, Pengamat Hama (POPT), dan petugas pertanian kabupaten.

4. Input
Tersedianya dana APBD Kabupaten Bondowoso bagi pelaksanaan kegiatan dan sumber daya manusia.

5. Output
Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kecamatan Wringin, Pakem dan Tegalampel.

6. Outcome
a. Peningkatan pemanfaatan pekarangan di Kecamatan Wringin, Pakem dan Tegalampel dibanding tahun sebelumnya.
b. Peningkatan produksi dan konsumsi komoditi hortikultura oleh rumah tangga terutama di wilayah Kecamatan Wringin, Pakem, dan Tegalampel.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

F. Desa Organik Berbasis Tanaman Sayuran, Tanaman Obat Dan Tanaman Buah
1. Latar Belakang
Selama ini petani telah terbiasa menggunakan pupuk produksi pabrik/anorganik. Dampak dari pemakaian pupuk anorganik adalah kian tidak responsifnya tanaman terhadap pemupukan, sehingga tingkat produktivitas tidak sebanding dengan penambahan input pupuk. Disamping itu pemakaian pestisida dalam jangka waktu yang lama dengan dosis yang tidak terkendali tantangan tersebut telah dicanangkan Indonesia Go Organik yaitu program yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sampah. Program tersebut dilakukan dengan pencanangan kegiatan "Desa Organik" di beberapa wilayah. Program Go Organik sangat bersinergis dengan pengelolaan sampah.
menjadi pupuk organik dan biogas, serta peningkatan produktivitas tanaman sayuran dan tanaman obat serta tanaman buah.


2. Tujuan
a. Mengembangkan budidaya sayuran, tanaman obat dan tanaman buah yang ramah lingkungan dengan mengikuti prinsip organik.
b. Menghasilkan produk sayuran, tanaman obat dan tanaman buah yang, bermutu dan aman konsumsi.

3. Sasaran
Terbentuknya Desa Organik yang dapat menghasilkan produk bermutu, dan aman konsumsi, terintegrasi dan memenuhi skala ekonomi.

4. Input
Tersedianya dana APBN bagi pelaksanaan kegiatan dan sumber daya manusia.

5. Output
b. Didistribusikannya produk bermutu untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggakeluarga dengan menerapkan budidaya dan pascapanan tanaman sayuran, tanaman obat dan tanaman buah dengan mengikuti prinsip organik.
c. Meningkatkan mutu dan keamanan produk sayuran, tanaman obat dan buah.

G. Pendampingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP)
1. Latar Belakang

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung upaya peningkatan daya saing produk pertanian lokal maupun olahannya, khususnya komoditas organik maka dilaksanakanlah Kegiatan Pendampingan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Tahun Anggaran 2016.

2. Tujuan
   a. Meningkatkan keterampilan petani anggota poktan/gapoktan dalam mengolah dan mengemas hasil pertanian.
   b. Penguatan kelembagaan Gapoktan.
   c. Peningkatan kualitas produk olahan hasil pertanian.
   d. Menyediakan sarana promosi dan pemasaran produk hasil pertanian berikut olahannya, utamanya produk organik melalui outlet Serambi Botanik dan pasar tani.

3. Sasaran
   Komoditas pertanian lokal berikut produk olahannya, khususnya produk organik.

4. Input
   Tersediannya dana APBD Kabupaten Bondowoso bagi pelaksanaan kegiatan.

5. Output
   Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP).

6. Outcome
   a. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian Kabupaten Bondowoso
   b. Peningkatan dan perluasan akses pasar bagi komoditas hasil pertanian dan produk olahannya, khususnya produk organik.
   c. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani.
   b. Peningkatan serapan tenaga kerja.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

H. Kegiatan Pelatihan Pembibitan Bambu
1. Latar Belakang

2. Tujuan
   Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya petani bambu) melalui usaha budidaya bambu dan pengelolaan rumpun agar dapat dipanen dan menghasilkan uang secara berkelanjutan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Bondowoso mensinergikan pemanfaatan bambu dengan upaya-upaya pelestarian agar bambu tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik.

3. Sasaran
Sasaran program ini adalah penduduk yang bermukim di desa lahan Kritis/kering di sekitar kawasan hutan. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terbatas kemampuan serta aksesnya dalam mendapatkan pelayanan, prasarana, dan permodalan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau menghadapi masalah khusus dan mendesak yang segera memerlukan penanganan dan bantuan.

Adapun bantuan yang diberikan Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bondowoso berupa pelatihan pembibitan bambu dengan peserta 200 orang, bibit bambu sebanyak 200 batang dan pupuk organik 2500 Kg.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jumlah Peserta</th>
<th>Bantuan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>200 peserta</td>
<td>Bibit Bambu</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>200 batang</td>
<td>2500 Kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input
Kegiatan ini didukung adanya pemberian bantuan pupuk organik di distribusikan ke beberapapenduduk desa yang melakukan kegiatan Pelatihan Pembibitan Bambu dan didanai dari pendapatan daerah yang sah.

5. Output
Dengan adanya kegiatan pelatihan pembibitan bambu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya petani bambu) melalui usaha budidaya bambu dan pengelolaan rumpun agar dapat dipanen dan menghasilkan uang secara berkelanjutan, serta dapat meningkatkan jumlah produksi hasil hutan non kayu (bambu).

6. Outcome
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat budidaya bambu sesuai dengan petunjuk teknis.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso

I. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
1. Latar Belakang
Belakangan ini mulai ditemukan berbagai permasalahan akibat kesalahan manajemen di lahan pertanian tersebut. Pencemaran pupuk kimia, pestisida dan lainnya akibat kelebihan pemakaian bahan-bahan tersebut, ini berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia akibat selu tercemar bahan-bahan sintetis tersebut. Pemahaman akan bahaya bahan kimia sintetis dalam jangka waktu lama mulai disadari sehingga dicari alternatif bercocok tanam yang dapat menghasilkan produk yang bebas dari cemaran bahan kimia sintetis serta menjaga lingkungan
yang lebih sehat. Sejak itulah mulai dilirik kembali cara pertanian alamiah (back to nature).

Sementara itu tingkat penggunaan pupuk anorganik semakin tidak rasional, dengan demikian akan terjadi kekurangan yang berakhir dengan kekacauan. Untuk hal tersebut di bidang perkebunan dan kehutanan mulai disarankan dengan penggunaan pupuk organik dengan memperhatikan kearifan lokal. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila kegiatan penyuluhan dan pembinaan petani kehutanan/perkebunan untuk diarahkan pada ketrampilan mengolah limbah menjadi produk yang jauh lebih bermanfaat semisal pupuk organik cair, granul maupun curah sesuai dengan memperhatikan kearifan lokal.

2. Tujuan

Memberikan gambaran secara global alur kerja pelaksanaan kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis petani kehutanan/perkebunan melalui bimbingan teknis ketrampilan pengolahan limbah pertanian/perkebunan menjadi produk yang bermanfaat semisal pupuk organik.

3. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Bagi Petani Kehutanan/Perkebunan Kelompok Tani yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Jumlah Petani</th>
<th>Jumlah Pupuk Organik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Wringin</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Pakem</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Tegalampel</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Curahdami</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Maesan</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Sumber Wringin</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Klabang</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Cermee</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Prajekan</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Botolinggo</td>
<td>40 Orang</td>
<td>125 Kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>JUMLAH</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>400 Orang</td>
<td>1250 Kg</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input

Kegiatan ini didukung adanya limbah ternak di tiap desa yang melimpah, sehingga perlu diadakan kegiatan bimbingan teknis ketrampilan pengolahan limbah pertanian/perkebunan menjadi produk yang bermanfaat semisal pupuk organik, yang didanai dari pendapatan daerah yang sah.

5. Output

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya bimtek/pembinaan yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan petanianggota kelompoktani binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso di 10 kecamatan yang dominan komoditi perkebunan dan kehutanan.
6. Outcome
Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan anggota kelompok tani bina Dinas Kehutanan dan Perkebunan sehingga mampu mengolah limbah pertanian/perkebunan menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih, misalnya menjadi produk pupuk organik.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso

J. Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Bagi Petani Kehutanan/Perkebunan

1. Latar Belakang

Sementara itu tingkat penggunaan pupuk anorganik semakin tidak rasional, dengan demikian akan terjadi kekurangan yang berakhir dengan kekacauan. Untuk hal tersebut di bidang perkebunan dan kehutanan mulai disarankan dengan penggunaan pupuk kandang. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila pemberian bantuan berupa Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Bagi Petani Kehutanan/Perkebunan.

2. Tujuan
Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Bagi Petani Kehutanan/Perkebunan dalam hal ini berupa bantuan bahan mikro organism, kotoran ternak dan bekatul untuk upaya mengembalikan fungsi hutan dan kesuburan lahan yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengembalikan fungsi kesuburan tanah.

3. Sasaran
Sasaran kegiatan Pembinaan Bagi Petani Kehutanan/Perkebunan adalah 336 orang anggota kelompok tani yang tersebar di 7 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:
4. Input

Kegiatan ini didukung adanya pemberian bantuan bahan mikro organisme, kotoran ternak dan bekatul di distribusikan ke beberapa kecamatan yang melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan bagi petani kehutanan/perkebunan, didanai dari pendapatan daerah yang sah.

5. Output

Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dalam pembuatan pupuk organik dan kepengurusan kelompok.

6. Outcome

Meningkatnya peran serta masyarakat atau kelompok tani binaan dalam pembuatan pupuk organik.

7. SKPD yang melaksanakan:

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso

K. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau

1. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau sudah seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hukum, prinsip dan keterbatasan daya dukung lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat di tawar-tawar lagi untuk semua sektor pembangunan termasuk pertanian, kesehatan dan sektor-sektor lainnya.

Semua pendekatan, strategi, teknologi dan praktek pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seharusnya diubah atau ditingkatkan menjadi pendekataan yang berwawasan lingkungan. Kerugian dan kerusakan lingkungan pertanian sudah mengancam kita, sehingga dapat mengganggu kelanjutan program pembangunan pertanian pada masa mendatang.

2. Tujuan

Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan petani meningkat dan kegiatan ini berupa bimtek/pembinaan yang diikuti petani Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
3. Sasaran
Daerah sentra tanaman tembakau yang ada di Kabupaten Bondowoso, terutama para petani yang tersebar di 6 kecamatan, yaitu:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Bantuan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Tamanan</td>
<td>pupuk kandang 500sak, dedak katul 1.000 kg, gula pasir 20 kg, sekam padi 3.000 kg, biakan murni/mikroorganisme 100 liter, pupuk majemuk Non Chlor 1000 kg, pupuk ZA 1.250 kg, pupuk KNO3 1000 kg, pupuk organik 25.000 kg, pestisida 50 lilit, terpal 10 buah, Termometer 10buah, timba plastik 50buah, gembor 50 buah, sekop 20buah</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Maesan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Wringin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Pakem</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Tegalampel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Taman Krocok</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input
Sebagai bahan masukan untuk mendukung kegiatan tersebut adalah daya dukung lahan yang cukup luas dan tersentra serta daya dukung petani yang cukup banyak dan sangat antusias untuk pengetahuan dan ketrampilan petani meningkat dalam rangka meningkatkan kualitas produksi tembakaunya, didanai dari bagi hasil.

5. Output
Keluaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini terlaksananya Sekolah Lapang Penanggulangan Hama Terpadu SL-PHT Tembakau.

6. Outcome
Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya pengetahuan dan keterampilan petani tembakau meningkat.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso

L. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Latar Belakang
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi hutan yang mengalami degradasi. Kegiatan ini sangat strategis karena dengan menanami lahan-lahan yang tidak produktif akan mengembalikan fungsi dan produktivitas hutan, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Disamping itu, keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan juga dapat mengurangi
tekanan terhadap hutan yang saat ini cenderung mengalami peningkatan.

Salah satu strategi yang dikembangkan sebagai implementasi dari paradigma pembangunan kehutanan adalah pengembangan hutan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembuatan tanaman hutan rakyat merupakan salah satu modal sosial yang bisa dikembangkan secara integratif dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.

Sementara itu tingkat penggunaan pupuk anorganik semakin tidak rasional, dengan demikian akan terjadi kekurangan yang berakhir dengan kekacauan. Untuk hal tersebut di bidang perkebunan dan kehutanan mulai disarankan dengan penggunaan pupuk kandang. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila pemberian bantuan berupa pupuk kandang.

2. Tujuan

Kegiatan peningkatan peranserta masyarakat pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam hal ini di 16 Kecamatan (Cermee, Prajekan, Klabang, Botolinggo, Tegalampel, Taman Kroock, Wringin, Pakem, Curahdami, Binakal, Grujungan, Maes, Tamanan, Pujer, Tlogosari dan Jambesari DS) untuk upaya mengembalikan fungsi hutan dan kesuburan hutan yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengembalikan fungsi kesuburan tanah.

3. Sasaran

Kegiatan peningkatan peranserta masyarakat pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahanberupa bantuan pupuk organik pada kelompok tani binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso dengan rincian sebagai berikut:

a. Persemaian Bibit Hutan Rakyat, satu paket (20 batangbambu, 14.000 kg pupuk kandang dan 1 l pupuk daun).

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nama Kelompok</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Volume</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Alam Hijau, Desa Solor</td>
<td>Cermee</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Rimba Jaya I, Desa Bandilan</td>
<td>Prajekan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Dumas Jaya, Desa Sempol</td>
<td>Prajekan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Lanas Jaya II, Desa Lanas</td>
<td>Botolinggo</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Tani Mulyo, Desa Karang Senon</td>
<td>Klabang</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Goeng Ryang, Desa Kemuningan</td>
<td>Taman Kroock</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Telaga, Desa Jambe Wungu</td>
<td>Wringin</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Tunas Harapan, Desa Mengok</td>
<td>Pujer</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Nusa Indah III, Desa Botolinggo</td>
<td>Botolinggo</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
</tbody>
</table>

b. Persemaian Bibit Pengkayaan Tanaman, satu paket (20 batangbambu, 14.000 kg pupuk kandang dan 1 l pupuk daun).
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nama Kelompok</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Volume</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Karya Bakti 16, Desa Karang Anyar</td>
<td>Klabang</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Sukma Makmur, Desa Kaburan</td>
<td>Grujunan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Cahaya Harapan, Desa Pakuwesi</td>
<td>Curahdami</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Tani Mulya, Desa Sumber Anyar</td>
<td>Jambesari DS</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Hikmah Tani IV, Desa Sumber Pakem</td>
<td>Maesan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Rukun Tani, Desa Bendelan</td>
<td>Binakal</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Jati Tani, Desa Jati Sari</td>
<td>Wringin</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
</tbody>
</table>

c. Pengembangan Hutan Bambu, satu paket (1 buah papan nama, 15.000 batangajir dan12.500 kg pupuk kandang).

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nama Kelompok</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Volume</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Harapan Makmur, Desa Gadingsari</td>
<td>Pakem</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Pandu Tani VII, Desa Jeruk Sok-sok</td>
<td>Binakal</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Sejahtera Tani 4, Desa Kretek</td>
<td>Taman Krokok</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Bukit Indah, Desa Sukodono</td>
<td>Pujer</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Sukma Makmur VII, Desa Sumber Anom</td>
<td>Tamanan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Tani Bakti I, Desa Koncer Darul Aman</td>
<td>Tenggarang</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Tani Makmur, Desa Petung</td>
<td>Pakem</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Bamburaya Inverstama, Desa Sulek</td>
<td>Tlogosari</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input

5. Output
Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah terlaksananya pembuatan hutan rakyat, kebun bibit dan pengembangan bambu.

6. Outcome

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso
M. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis

1. Latar Belakang

Kerusakan hutan dan lahan saat ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak. Fenomena degradasi sumberdaya hutan dan lahan terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Kerusakan hutan dan lahan tersebut telah mengakibatkan bencana alam yang besar, bahkan pada ahir-ahir ini kecenderungannya semakin meningkat, khususnya banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Mengingat besarnya dampak kerusakan hutan dan lahan, maka pendekatan rehabilitasi hutan dan lahan salah satu kegiatannya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan penanganan lahan kritis.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan penanganan lahan kritis adalah untuk memberdayakan (mengerakkan) para pihak terkait di tingkat desa demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

3. Sasaran

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan penanganan lahan kritis berupa bantuan pupuk kandang pada kelompok tani binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso dengan rincian sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nama Kelompok</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Volume</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Bumi Paras Gersang, Desa Bandilan</td>
<td>Prajegan</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Wana Tani, Desa Banyuwuluh</td>
<td>Wringin</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Subur Makmur, Desa Pecalongan</td>
<td>Sukosari</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Sari Tani, Desa Nogosari</td>
<td>Sukosari</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Sandang Pangan, Desa Klabang</td>
<td>Tegalampel</td>
<td>1 Paket</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input

Tersedianya dana dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Output

Keluaran yang diharapkan pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan penanganan lahan kritis adalah meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan penanganan lahan kritis.

6. Outcome

a. Jumlah akumulasi luasan lahan kritis.
   b. Peningkatan jumlah bibit tanaman kehutanan.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso
N. Kegiatan Penghijauan dan Penghutanan Kembali Kawasan Hutan
1. Latar Belakang
Hutan merupakan tanah luas yang ditumbui pepohonan. Hutan berguna dalam menjaga lingkungan bagi manusia. Pepohonan dalam hutan mempunyai banyak fungsi diantaranya adalah: menahan laju erosi tanah, menyerap karbon dioksida, menambah unsur hara tanah, pelindung spesies mahluk hidup tertentu, penyimpan air hujan dan sumber air, mampu mengurangi kecepatan angin dan lain sebagainya.

Namun banyaknya penebangan liar atau alih fungsi lahan menjadi ladang membuat banyak hutan menjadi gundul sehingga bisa menyebabkan bencana alam yang merugikan manusia. Untuk itu perlu upaya penghijauan atau penanaman kembali pohon pada hutan yang telah gundul agar tidak terjadi bencana.

2. Tujuan
Penghijauan dan penghutanan yang telah gundul atau tandus disebut dengan Reboisasi. Reboisasi hanya dilakukan di hutan atau lahan yang kosong atau gundul, tentunya hutan yang dimaksud adalah hutan yang telah ditentukan oleh peraturan. Dengan demikian, membuat hutan yang baru pada area bekas tebang habis, bekas tebang pilih, lahan gundul ataupun pada lahan kosong lainnya yang terdapat di dalam kawasan hutan itu termasuk kedalam reboisasi. Tujuan dari reboisasi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup khususnya manusia melalui kualitas peningkatan sumber daya alam. Dengan kembali fungsinya hutan maka dapat menghindarkan lingkungan hidup dari polusi udara, kembali ekosistem dan dengan reboisasi dapat menanggulangi *global warming*.

3. Sasaran
Kegiatan penghijauan dan penghutanan kembali kawasan hutan salah satunya berupa bantuan Media Tanam/kompos dan pupuk organik.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Lokasi</th>
<th>Bantuan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Desa Walidono,</td>
<td>Media tanam/kompos 90.300 kg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kecamatan Prajekan</td>
<td>dan pupuk organik 1.200kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input
Kegiatan ini didukung adanya pemberian bantuan media/kompos dan pupuk organik yang didanai dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Output
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penghijauan dan penghutanan kembali adalah terbentuknya hutan produksi.

6. *Outcome*
a. Jumlah akumulasi luasan lahan kritis.
b. Peningkatan jumlah bibit tanaman kehutanan.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.
O. Kegiatan Pengembangan bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

1. Latar Belakang

Bibit adalah aspek penting dalam keberhasilan budidaya, karena keunggulan bibit baru akan terlihat sesudah tanaman memasuki umur produksi dan sebagai salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan dalam upaya peningkatan produksi dan mutu hasil produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat. Bibit merupakan awal kehidupan suatu tanaman seperti dalam istilah disebutkan “Beginning of Life” artinya awal kehidupan. Artinya bahwa dengan bibit maka suatu tanaman dapat meneruskan sifat-sifat yang dimilikinya. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan terkait dengan penggunaan bibit unggul meliputi; informasi bibit unggul yang masih terbatas sehingga pengetahuan masyarakat akan manfaat bibit unggul bermutu masih rendah, terbatasnya ketersediaan bibit unggul, lokasi sumber bibit yang tidak sesuai dengan daerah pengembangan, mahalnya harga bibit unggul, belum tersedianya sumber bibit jenis tertentu.

Sampai saat ini masih banyak petani yang tetap menggunakan bibit lokal sebagai bibit yang diperoleh dari hasil panen sebelumnya. Secara tradisional petani melakukan pemilihan pada waktu pemungutan hasil atau panen, seperti pemilihan hasil (seleksi) untuk bibit tebu dan beberapa jenis tanaman lainnya. Bibit yang berasal dari tanaman yang baik mereka sisihkan, dirawat dan disimpan dengan baik. Dengan cara tersebut tingkat mutu dan hasil tanaman belum tentu baik, jika dibandingkan dengan bibit yang telah melalui tahapan pengujian mutu. Penggunaan bibit palsu atau bibit ilegitim masih banyak terjadi disebabkan oleh kesenjangan permintaan dan kemampuan produksi bibit, kurang informasi dan pengetahuan konsumen mengenai bahan tanam yang baik dan benar, harga bibit ilegitim lebih murah dibanding bibit unggul, dan prosedur pembelian bibit dari produsen yang ditunjuk pemerintah dianggap masih banyak masalah oleh sebagian konsumen. Akibatnya dapat menurunkan produktivitas dan merusak citra produsen bibit yang dipalsukan.

2. Tujuan

Menilik dari tinjauan tersebut maka sistem pembibitan harus mampu menjamin ketersediaan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan dengan konsekuensi keberadaan dan peredaran benih perlu dilakukan pengawasan. Kesadaran masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan bibit unggul bermutu relatif masih rendah, masih banyak yang menggunakan bibit asalan atau bibit palsu yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Tantangan dan tugas kita bersama membina dan mensosialisasikan akan pentingnya penggunaan benih unggul bermutu sehingga potensi produktifitas yang diharapkan dapat tercapai.
3. Sasaran
Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan salah satunya berupa bantuan pemberian pupuk organik.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Lokasi</th>
<th>Bantuan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Desa Gununganyar, Kecamatan Tapen</td>
<td>Pupuk organik 4.000 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input
Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan sumber dananya dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Output
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan adalah meningkatnya pengembangan bibit unggul perkebunan.

6. Outcome
Peningkatan produktifitas hasil perkebunan: produksi dan produktivitas tebu.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.

P. Kegiatan Pengembangan dan Intensifikasi Kopi Specialty
1. Latar Belakang

Kopi specialty juga mampu memberikan citra (image) baik bagi negara penghasilnya. Segmentasi pasar kopi specialty memperlihatkan kecenderungan yang kian meningkat pada waktu-waktu yang akan datang, sehingga peluang ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan kopi nasional.

2. Tujuan
Tujuan kegiatan Pengembangan dan intensifikasi kopi specialty tahun 2016 adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman kopi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun kopi.
3. Sasaran

Beberapa daerah di Bondowoso potensial untuk pengembangan kopi specialty dan agar upaya tersebut dapat berhasil perlu adanya komitmen kelompok tani terhadap mutu, produksi, harga dan promosi dengan disertai strategi pengembangan yang tepat serta bantuan pupuk organik yang berlokasi:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nama Kelompok Tani</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Volume</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Harapan Makmur II,</td>
<td>Sumber Wringin</td>
<td>7.500 kg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Desa Rejoagung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td></td>
<td>Tlogosari</td>
<td>7.500 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input

Untuk mendukung pengembangan kopi nasional peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain memfasilitasi penyediaan benih unggul dan pemberian pupuk organik, serta melakukan pembinaan dan pengawalan, dengan sumber dana lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Output

Keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya tanaman kopi.

6. Outcome

Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan produktivitas hasil perkebunan berupa produktivitas kopi arabika.

7. SKPD yang melaksanakan:

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso

Q. Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa

1. Latar Belakang

Tanaman kelapa diremajakan jika telah berumur ≥ 60 tahun. Peremajaan juga dilakukan pada pohon kelapa yang berumur < 60 tahun jika tanaman tidak produktif, atau produksi kurang dari 30 butir/pohon/tahun. Agar tidak mengganggu kebutuhan bahan baku kelapa dalam jangka panjang, jumlah pohon kelapa yang dapat diremajakan dalam satu wilayah maksimal 15%-16% dari populasi tanaman kelapa. Metode peremajaan yang dianjurkan adalah tebang bertahap 20% per tahun.

Metode tebang bertahap sebesar 20% per tahun merupakan alternatif paling tepat untuk diterapkan ditinjau dari segi agronomis dan pendapatan petani. Metode peremajaan kelapa tebang bertahap dapat dilakukan sambil menerapkan jarak tanam baru, yaitu 6 m x 16 m sistem pagar dan pemberian pupuk organik yang optimal.

2. Tujuan

Untuk mendapatkan hasil panen yang optimal (30butir/pohon/tahun) yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, Serta dapat memberi penghasilan yag cukup bagi petani kelapa.
3. Sasaran
Sasaran yang adalah kelompok tani binaan Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bondowoso, yang berlokasi di:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nama Kelompok Tani</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Volume</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Suka Makmur IV, Desa Grujugan Kidul</td>
<td>Grujugan</td>
<td>10.047 Kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input
Kegiatan ini didukung adanya pemberian bantuan pupuk organik yang didistribusikan ke kelompok tani binaan Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bondowoso, dengan pendanaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Output
Keluaran yang diharapkan pada kegiatan ini adalah meningkatnya mutu tanaman kelapa.

6. Outcome
Hasil yang diharapkan adalah tercapainya peremajaan tanaman kelapa.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.

R. Kegiatan Standarisasi Kwalitas Bahan Baku Tembakau
1. Latar Belakang
Pelaksanaan program pembangunan sudah seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hukum, prinsip dan keterbatasan daya dukung lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang berawasan lingkungan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat di tawar-tawar lagi untuk semua sektor pembangunan termasuk pertanian, kesehatan dan sektor-sektor lainnya.

Semua pendekatan, strategi, teknologi dan praktek pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seharusnya diubah atau ditingkatkan menjadi pendekatan yang berawasan lingkungan. Kerugian dan kerusakan lingkungan pertanian sudah mengancam kita, sehingga dapat menggangu kelanjutan program pembangunan pertanian pada masa mendatang.

2. Tujuan
Untuk Mengurangi pencemaran terhadap lahan maupun hasil produksi tanaman tembakau akibat penggunaan bahan-bahan kimia seperti pestisida, pupuk buatan dan zat pengatur tumbuh.

3. Sasaran
Daerah sentra tanaman tembakau yang ada Kecamatan Tlogosari, Pujer, Jambesari DS, Tamanan, Tenggarang, Maesan, Grujugan, Bondowoso, Curahdami, Wringin, Pakem, Tegalampel, Taman Krocek, Wenosari, Tapen, Cermec, Binakal dan Botolinggo di
3. Sasaran

Pemanfaatan lahan semaksimal mungkin untuk menghasilkan tanaman yang optimal serta untuk meningkatkan pendapatan bagi petani/kelompok tani binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso, bantuan berupa:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Desa</th>
<th>Kelompok</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Maesan</td>
<td>Tanah Wulan</td>
<td>Sinar Tani</td>
<td>5.500 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input

Daya dukung bantuan pupuk organik dan antusias petani yang cukup tinggi untuk meningkatkan penghasilan petani dan kelompok tani, sumber dana kegiatan ini dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Output

Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya diversifikasi tanaman cengkeh dengan tanaman kopi.

6. Outcome

Keluaran yang dihasilkan adalah terlaksananya peningkatan produktivitas hasil perkebunan cengkeh dan kopi.

7. SKPD yang melaksanakan:

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso

T. Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat

1. Latar Belakang

Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi hutan yang mengalami degradasi. Kegiatan ini sangat strategis karena dengan menanami lahan-lahan yang tidak produktif akan mengembalikan fungsi dan produktifitas hutan, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Disamping itu, keberhasilan Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutani Rakyat juga dapat mengurangi tekanan terhadap hutan yang saat ini cenderung mengalami peningkatan.

Salah satu strategi yang dikembangkan sebagai implementasi dari paradigma pembangunan kehutanan adalah pengembangan hutan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembuatan tanaman hutan rakyat merupakan salah satu modal sosial yang bisa dikembangkan secara integratif dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.

Sementara itu tingkat penggunaan pupuk anorganik semakin tidak rasional, dengan demikian akan terjadi kecurangan yang berakhir dengan kekacauan. Untuk hal tersebut di bidang perkebunan dan kehutanan mulai disarankan dengan penggunaan pupuk kandang. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila pemberian bantuan berupa pupuk kandang.
2. Tujuan
   Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat dalam hal ini berupa bantuan pupuk kandang untuk upaya mengembalikan fungsi hutan dan kuesbon hutan yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengembalikan fungsi kuesbon tanah.

3. Sasaran
   Lahan hutan sektor perkebunan yang kondisi tanah kurang subur atau mempunyai lahan kritis, bantuan berupa pupuk organik:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Desa</th>
<th>Jumlah (Kg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Wringin</td>
<td>Wringin</td>
<td>1.500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Input
   Kegiatan ini didukung adanya pemberian bantuan pupuk organik yang di distribusikan ke kecamatan Wringin yang melakukan kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan melalui kelompok-kelompok binaan, sumber dana berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Output
   Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan usaha peningkatan peran serat masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.

6. Outcome
   Harapan mampu meningkatnya jumlah luasan hutan rakyat.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso

U. Perluasan Lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT)

1. Latar Belakang
   Secara umum usaha peternakan di Kabupaten Bondowoso diusahakan secara tradisional dan belum memperhatikan pengelolaan pakan ternak dalam usaha peternakannya, sehingga hasil usaha peternakan belum maksimal. Permasalahan tersebut antara lain:
   a. Petani peternak di pedesaan masih mengabaikan dan menelantarkan lahan marginal.
   b. Petani peternak sebagian besar belum mau memanfaatkan lahan marginal untuk penanaman HMT.
   c. Petani peternak belum seluruhnya melaksanakan penanaman HMT pada lahan marginal sebagai pemenuhan kestabilan pakan ternak.

   Oleh karena itu, untuk mendorong agar petani peternak mau dan mampu mengelola pakan ternak, perlu diadakan sosialisasi dan percontohan di dekat petani peternak secara langsung, terutama melalui kelompok-kelompok ternak.

2. Tujuan
a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta membangun kesadaran pentingnya pengelolaan pakan ternak.
b. Mengajak petani peternak untuk bisa menanam HMT dan memanfaatkan HMT sebagai pakan ternak dengan baik.

3. Sasaran
   Petani peternak dan lingkungannya.

4. Input
   a. Tersedia dana untuk pelaksanaan.
   b. Tersedia sarana dan prasarana hijauan makanan ternak (HMT).

5. Output
   a. Terlaksananya kegiatan perluasan lahan hijauan makanan ternak.
   b. Petani peternak menerima sarana dan prasarana HMT sebagai upaya pengelolaan pakan.

6. Outcome
   a. Petani peternak dapat memanfaatkan dan memperluas lahan HMT, terutama pada lahan marginal.
   b. Petani peternak dapat meningkatkan kualitas pakan ternak.
   c. Petani peternak dapat mengelola pakan untuk usaha ternaknya.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso

V. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Petani Peternak

1. Latar Belakang
   Secara umum usaha peternakan di Kabupaten Bondowoso diusahakan secara tradisional dan belum memperhatikan manajemen usaha peternakannya, mulai dari pemilihan bibit, perkandangan, pengelolaan pakan, kesehatan hewan dan reproduksi serta pengelolaan limbah kotoran ternak. Permasalahan tersebut antara lain:
   a. Petani peternak di pedesaan masih melakukan usaha peternakan berdasarkan pengalaman dan bersifat tradisional.
   b. Petani peternak sebagian besar belum mampu melakukan prinsip-prinsip usaha peternakan secara benar.

   Oleh karena itu, untuk mendorong agar petani peternak mau dan mampu melakukan prinsip-prinsip usaha peternakan secara benar, sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan kepada petani peternak secara langsung, terutama melalui kelompok-kelompok ternak.

2. Tujuan
   a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta membangun kesadaran pentingnya melakukan prinsip-prinsip usaha peternakan untuk meningkatkan usaha dan hasil peternakan.
   b. Mengajak petani peternak untuk mampu dan memulai usaha peternakan berdasarkan prinsip-prinsip usaha peternakan secara benar.
3. Sasaran
Petani peternak dan lingkungannya.

4. Input
a. Tersedia dana untuk pelaksanaan.
b. Tersedia sosialisasi dan pembinaan kelompok ternak.

5. Output
a. Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani peternak.
b. Petani peternak menerima sosialisasi dan pembinaan kelompok ternak.

6. Outcome
a. Petani peternak dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta SDM, terutama tentang prinsip-prinsip usaha peternakan.
b. Petani peternak dapat meningkatkan kesadaran pentingnya melakukan dan melaksanakan prinsip-prinsip usaha peternakan untuk meningkatkan produktivitas ternak.
c. Petani peternak dapat memulai usaha peternakan berdasarkan prinsip-prinsip usaha peternakan.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso

W. Optimalisasi Inseminasi Buatan
1. Latar Belakang
Secara umum usaha peternakan di Kabupaten Bondowoso diusahakan secara tradisional, meskipun sudah banyak peternak mengenal inseminasi buatan, dan belum memperhatikan pengelolaan reproduksi ternak. Permasalahan tersebut antara lain:
a. Petani peternak di pedesaan belum mampu mendeteksi dengan benar ternak birahi hingga kebuntingan pada ternak.
b. Petani peternak sebagian besar belum menyadari pentingnya pengelolaan reproduksi ternak.

Oleh karena itu, untuk mendorong agar petani peternak mau dan mampu memperhatikan pengelolaan reproduksi ternak, perlu diadakan sosialisasi dan pemeriksaan kebuntingan, terutama langsung kepada petani peternak akseptor inseminasi buatan.

2. Tujuan
a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan petenai peternak tentang pengelolaan reproduksi ternak.
b. Mengajak petani peternak untuk menyadari pentingnya pemeriksaan kebuntingan ternak.

3. Sasaran
Petani peternak dan lingkungannya.

4. Input
a. Tersedia dana untuk pelaksanaan.
b. Tersedia pemeriksaan kebuntingan ternak hasil inseminasi buatan.

5. Output
a. Terlaksananya kegiatan optimalisasi inseminasi buatan berupa pemeriksaan kebuntingan ternak.
b. Peternak menerima pemeriksaan kebuntingan ternak hasil inseminasi buatan, sehingga dapat meningkatkan populasi dan produksi ternak.

6. Outcome
   a. Petani peternak menyadari pentingnya pengelolaan reproduksi ternak.
   b. Petani peternak dapat menerima pemeriksaan kebuntingan ternak.
   c. Petani peternak mampu meningkatkan populasi dan produksi ternak melalui inseminasi buatan.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso

X. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

1. Latar Belakang
   Secara umum usaha peternakan di Kabupaten Bondowoso diusahakan secara tradisional dan belum memperhatikan manajemen usaha peternakannya. Permasalahan tersebut antara lain:
   a. Petani peternak di pedesaan masih melakukan usaha peternakan berdasarkan pengalaman dan bersifat tradisional.
   b. Petani peternak sebagian besar belum mampu melakukan prinsip-prinsip usaha peternakan secara benar.
   c. Petugas peternakan kecamatan belum banyak mengikuti perkembangan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna.

   Oleh karena itu, untuk mendorong agar petani peternak mau dan mampu melakukan prinsip-prinsip usaha peternakan secara benar, sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan kepada petani peternak secara langsung, terutama melalui kelompok-kelompok ternak. Untuk meningkatkan sumber daya manusia peternak perlu upaya pembekalan peternak melalui pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna.

2. Tujuan
   a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan peternak tentang prinsip-prinsip usaha peternakan terutama terkait dengan penerapan teknologi peternakan tepat guna.
   b. Meningkatkan peran aktif peternak sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan peternakan.

3. Sasaran
   Peternak yang tergabung dalam kelompok ternak.

4. Input
   a. Tersedia dana untuk pelaksanaan.
   b. Tersedia pelatihan teknologi peternakan tepat guna bagi peternak.
5. Output
a. Terlaksananya kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna.
b. Petani peternak menerima pelatihan teknologi peternakan tepat guna.

6. Outcome
a. Peternak dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta SDM, terutama tentang penerapan teknologi peternakan tepat guna.
b. Peternak dapat meningkatkan kesadaran pentingnya tentang penerapan teknologi peternakan tepat guna.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso

Y. Pengembangan Ternak Domba (Program Anti Kemiskinan)
1. Latar Belakang
   Anti Poverty Program merupakan salah satu kebijakan percepatan penanganan Kemiskinan dengan pemberdayaan usaha ekonomi produktif yang difasilitasi pendampingan konsultasi teknis berupa ternak domba.

2. Tujuan
   a. Umum
      Penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli melalui pemberdayaan usaha kelompok masyarakat miskin.
   b. Khusus
      1) Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan secara transparan, demokratis dan bertanggung jawab
      2) Mengembangkan kemampuan dan peluang usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin
      3) Mengembangkan kelompok masyarakat miskin yg berpotensi melalui usaha kemitraan untuk pemasaran hasil produknya.

3. Sasaran
   Kelompok masyarakat rumah tangga miskin.

4. Input
   a. Tersedia dana untuk pelaksanaan.
b. Tersedia ternak domba.

5. Output
   a. Terlaksananya kegiatan pengembangan ternak domba.
b. Petani peternak menerima ternak domba sebagai upaya usaha pengentasan kemiskinan.

6. Outcome
   a. Petani peternak dapat memanfaatkan ternak domba.
b. Petani peternak dapat meningkatkan perekonomiannya.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso
Z. Pembinaan Wilayah Binaan UPT Puskeswan

1. Latar Belakang

Secara umum usaha peternakan di Kabupaten Bondowoso diusahakan secara tradisional dan belum memperhatikan manajemen usaha peternakannya. Keberadaan puskeswan yang membawahi beberapa kecamatan sangat penting dan harus terus meningkatkan peran serta puskeswan langsung kepada peternak. Permasalahan tersebut antara lain:

a. Petani peternak di pedesaan masih melakukan usaha peternakan berdasarkan pengalaman dan bersifat tradisional.
b. Petani peternak sebagian besar belum mampu melakukan prinsip-prinsip usaha peternakan secara benar.
c. Peran puskeswan masih belum maksimal dalam melakukan pembinaan dan pelayanan terkait dengan usaha peternakan.

Oleh karena itu, untuk mendorong agar puskeswan dapat meningkatkan peran serta fungsi puskeswan perlu dilakukan pembinaan kelompok ternak binaan puskeswan untuk meningkatkan kapasitas SDM peternak.

2. Tujuan

a. Meningkatkan peran serta fungsi puskeswan sebagai ujung tombak pembangunan peternakan.
b. Meningkatkan pembinaan wilayah sumber daya peternak.

3. Sasaran

Petani peternak dan lingkungannya.

4. Input

a. Tersedia dana untuk pelaksanaan.
b. Tersedia upaya peningkatan kapasitas SDM peternak.

5. Output

a. Terlaksananya kegiatan pembinaan wilayah binaan UPT Puskeswan.
b. Petani peternak menerima pembinaan tentang usaha peternakan pada wilayah binaan UPT Puskeswan.

6. Outcome

a. UPT Puskeswan dapat meningkatkan peran serta aktifnya sebagai ujung tombak pembangunan peternakan.
b. UPT Puskeswan dapat meningkatkan kapasitas SDM peternak.

7. SKPD yang melaksanakan:

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso

AA. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

1. Latar Belakang

Secara umum usaha peternakan di Kabupaten Bondowoso diusahakan secara tradisional dan belum memperhatikan manajemen usaha peternakannya. Keberadaan puskeswan yang membawahi beberapa kecamatan sangat penting dan harus terus meningkatkan peran serta puskeswan langsung kepada peternak. Permasalahan tersebut antara lain:
a. Petani peternak di pedesaan masih melakukan usaha peternakan berdasarkan pengalaman dan bersifat tradisional.
b. Petani peternak sebagian besar belum dapat menjaga kesehatan ternak dan masih banyak muncul penyakit ternak.
c. Peran puskeswan masih belum maksimal dalam melakukan pembinaan dan pelayanan terkait dengan kesehatan ternak.

Oleh karena itu, untuk mendorong agar puskeswan dapat meningkatkan peran serta fungsi puskeswan perlu dilakukan pelayanan kesehatan hewan ternak besar di masyarakat.

2. Tujuan
a. Meningkatkan peran serta fungsi puskeswan sebagai ujung tombak pembangunan peternakan.
b. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan masal ternak besar di masyarakat.

3. Sasaran
Petani peternak dan lingkungannya.

4. Input
a. Tersedia dana untuk pelaksanaan.
b. Tersedia upaya meningkatkan kesehatan ternak besar di masyarakat melalui pengobatan masal.

5. Output
a. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
b. Petani peternak menerima pelayanan kesehatan hewan ternak besar.

6. Outcome
a. UPT Puskeswan dapat meningkatkan peran serta aktifnya sebagai ujung tombak pembangunan peternakan.
b. Petani peternak dapat meningkatkan status kesehatan ternak hewan besar melalui pengobatan masal pada ternak.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso

BB. Optimalisasi Pusat Kesehatan Hewan

1. Latar Belakang
Secara umum usaha peternakan di Kabupaten Bondowoso diusahakan secara tradisional dan belum memperhatikan manajemen usaha peternakannya. Keberadaan puskeswan yang membawahi beberapa kecamatan sangat penting dan harus terus meningkatkan peran serta puskeswan langsung kepada peternak. Permasalahan tersebut antara lain:

a. Petani peternak di pedesaan masih melakukan usaha peternakan berdasarkan pengalaman dan bersifat tradisional.
b. Petani peternak sebagian besar belum dapat menjaga kesehatan ternak dan masih banyak muncul penyakit ternak.
c. Peran puskeswan masih belum maksimal dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan ternak.
Oleh karena itu, untuk mendorong agar puskkeswan dapat meningkatkan peran serta fungsi puskkeswan perlu dilakukan pelayanan kesehatan hewan yang maksimal.

2. Tujuan
   a. Meningkatkan peran serta fungsi puskkeswan sebagai ujung tombak pembangunan peternakan.
   b. Meningkatkan kebutuhan dalam pelayanan kesehatan hewan oleh pusat kesehatan hewan (puskeswan).

3. Sasaran
   Petani peternak dan lingkungannya.

4. Input
   a. Tersedia dana untuk pelaksanaan.
   b. Tersedia upaya peningkatan pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan puskkeswan.

5. Output
   a. Terlaksananya kegiatan optimalisasi puskkeswan.
   b. Petani peternak menerima pelayanan kesehatan hewan secara maksimal oleh puskkeswan.

6. Outcome
   a. UPT Puskkeswan dapat meningkatkan peran serta aktifnya sebagai ujung tombak pembangunan peternakan.
   b. Petani peternak dapat menerima pelayanan kesehatan hewan secara maksimal oleh puskkeswan mulai dari pembinaan kelompok, pelayanan pengobatan ternak hingga pemeriksaan laboratorium.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso

CC. Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

1. Latar Belakang
   a. Peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman untuk dikonsumsi, merata dan terjangkau.
   b. Peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
   c. Kurangnya pengetahuan masyarakat di tingkat rumah tangga dalam mengelola cadangan pangan dan memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal.
   d. Peningkatan ketersediaan pangan, perbaikan gizi, mengurangi pengeluaran keluarga dan atau menambah pendapatan keluarga.

2. Tujuan
   a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga.
   b. Meningkatkan penganekekaragaman pangan.
   c. Meningkatkan kualitas gizi keluarga.
   d. Meningkatkan pendapatan keluarga.
   e. Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di setiap desa.
3. Sasaran
Seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bondowoso, melalui:

a. Pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK desa, Dasa Wisma dan kelompok wanita.
b. Menumbuhkembangkan kebun bibit desa dan sarana penunjang lainnya.
c. Meningkatkan peran Koperasi Wanita sebagai sumber permodalan, penyedia agro input dan pemesan hasil produksi.
d. Meningkatkan peran POSYANDU/PAUD sebagai sarana peningkatan gizi keluarga.

4. Input
a. Meningkatkan gizi di tingkat rumah tangga.
b. Peningkatan pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga.
c. Perbaikan mutu produk pangan di tingkat rumah tangga.

5. Output
a. Terselelggaranya sosialisasi tentang pengembangan KRPL.
b. Terlaksananya pembuatan bedengan/pekarangan untuk pemanfaatan lahan pekarangan di tingkat rumah tangga.
c. Tersedianya dana stimulus untuk pengembangan KRPL.
d. Terlaksananya pelatihan teknis bagi petugas pendamping desa/kelurahan okasi KRPL.
e. Terlaksananya pelatihan manajemen bagi pelaku KRPL.
f. Terselenggaranya peningkatan mutu produk pangan agar aman dikonsumsi di tingkat rumah tangga.
g. Meningkatnya pendapatan keluarga.

6. Outcome
a. Tersedianya tanaman sayuran, buah-buahan, ternak dan ikan di lokasi KRPL.
b. Meningkatnya kemampuan anggota PKK dalam mengelola lahan pekarangan secara optimal.
c. Meningkatnya kemampuan petugas dalam mendampingi TP PKK desa/kelurahan.
d. Meningkatnya manajemen TP PKK desa/kelurahan dalam mengelola KRPL di wilayahnya.
e. Agar kelompok wanita memahami tentang mutu hasil produk pangan di tingkat rumah tangga.

7. SKPD yang melaksanakan:
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso.

DD. Kegiatan Karang Kitri

1. Latar Belakang
a. Adanya degradasi lahan yang beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
b. Semakin meluasnya lahan kritis sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kekeringan, banjir atau tanah longsor. Untuk itu perlu upaya untuk memulihkan dan menjaga kelestarian fungsi lahan pekarangan melalui kegiatan karang kitri
c. Sumber daya lahan pekarangan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga kelestarianfungsi dan kualitas sistem penyanga kehidupan dan sumber kemakmuran masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga.
d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya ditingkat rumah tangga melalui peningkatan produktivitas tanaman pekarangan.
e. Peningkatan ketersediaan pangan, perbaikan gizi, mengurangi pengeluaran keluarga dan atau menambah pendapatan keluarga.

2. Tujuan
a. Memulihkan, mempertahankan dan menjaga kelestarian fungsi lahan pekarangan.
b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan.
c. Peningkatan produktivitas lahan pekarangan.
d. Meningkatkan pendapatan keluarga.
e. Meningkatkan gizi keluarga melalui penganekearagaman jenis tanaman yang diproduksi dan dikonsumsi oleh keluarga.

3. Sasaran
Seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bondowoso, melalui:
a. Pemberdayaan ibu-ibu rumah-tangga yang tergabung dalam PKK desa, Dasa Wisma dan kelompok wanita.
b. Menumbhukembangkan kebun bibit desa dan sarana penunjang lainnya.
c. Meningkatkan peran POSYANDU/PAUD sebagai sarana peningkatan gizi keluarga.

4. Input
a. Meningkatkan gizi di tingkat rumah tangga.
b. Peningkatan pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga.
c. Peningkatan produksi lahan pekarangan.
d. Sebagai perlindungan terhadap tanah dan air sehingga mengurangi resiko lahan kritis.

5. Output
a. Terseelenggaranya sosialisasi tentang pengembangan Karang Kitri.
b. Terlaksananya pembuatan bedengan/pekarangan untuk pemanfaatan lahan pekarangan di tingkat rumah tangga.
c. Terseelenggaranya peningkatkan mutu produk pangan agar aman dikonsumsi di tingkat rumah tangga.
d. Meningkatnya pendapatan keluarga.

6. Outcome
b. Meningkatnya peranan anggota PKK maupun kelompok wanita dalam mendukung lahan pekarangan sebagai salah satu sistem penyanga kehidupan.
c. Meningkatnya kemampuan anggota PKK maupun kelompok wanita dalam mengelola lahan pekarangan secara optimal.
d. Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan sehingga dalam jangka panjang bahan organik yang berasal dari ternak dan
tanaman pekarangan mampu memelihara kesuburan tanah dan menghindari terjadinya erosi dan proses perusak lainnya.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso

EE. Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri
1. Latar Belakang
   Dibutuhkan sarana promosi dan pemasaran bagi produk-produk Gerakan Botanik.

2. Tujuan
   Menyediakan sarana promosi dan pemasaran bagi produk-produk Gerakan Botanik.

3. Sasaran
   Show Room Produk Unggulan Kabupaten Bondowoso.

4. Input
   APBD Kabupaten Bondowoso Rp 247.300.000,00.

5. Output
   Operasional Show Room Produk Unggulan berjalan lancar.

6. Outcome
   Menyediakan sarana promosi dan pemasaran bagi produk Gerakan Botanik.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso

FF. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
1. Latar Belakang
   Dibutuhkan sarana promosi dan pemasaran bagi produk-produk Gerakan Botanik.

2. Tujuan
   Menyediakan sarana promosi dan pemasaran bagi produk-produk Gerakan Botanik.

3. Sasaran
   Memperluas jangkauan pemasaran produk unggulan Kabupaten Bondowoso.

4. Input
   APBD Kabupaten Bondowoso Rp 850.000.000,00.

5. Output
   Terselenggaranya pameran Festival Muharram.

6. Outcome
   Menyediakan sarana promosi dan pemasaran produk Gerakan Botanik.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso

GG. Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional
1. Latar Belakang
   Dibutuhkan sarana promosi dan pemasaran bagi produk-produk Gerakan Botanik.

2. Tujuan
   Menyediakan sarana promosi dan pemasaran bagi produk-produk Gerakan Botanik.

3. Sasaran
   Memperluas jangkauan pemasaran produk unggulan Kabupaten Bondowoso.

4. Input
   APBD Kabupaten Bondowoso Rp 800.000.000,00.

5. Output
   Terlaksananya partisipasi dalam acara pameran baik regional maupun nasional.

6. Outcome
   Meningkatnya jangkauan pemasaran produk Gerakan Botanik.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso

HH. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Daerah
1. Latar Belakang
   Dibutuhkan sarana pemasaran bagi produk-produk Gerakan Botanik.

2. Tujuan
   Menyediakan sarana pemasaran bagi produk-produk Gerakan Botanik.

3. Sasaran
   Meningkatkan pemasaran produk unggulan Kabupaten Bondowoso.

4. Input
   APBD Kabupaten Bondowoso Rp 15.000.000,00.

5. Output
   Kelikutsertaan dalam pasar lelang Puspa Agro Sidoarjo

6. Outcome
   Meningkatnya pemasaran produk Gerakan Botanik.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso
II. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Perdesaan

1. Latar Belakang

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dibidang 1. Infrastruktur prasarana serta sarana dasar pekerjaan umum; 2. Khususnya dibidang jalan dan jembatan serta prasarana dasar permukiman/air bersih dan air limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kelancaran aksesibilitas perekonomian dan permukiman sehat. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta peningkatan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat yang mendukung program pelaksanaan gerakan Botanik di Kabupaten Bondowoso yang tidak mencemari lingkungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Tujuan

Tercapainya pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan.

3. Sasaran

Terserba di 3 lokasi khususnya yaitu Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonasari, Desa Taal Kecamatan Tapen dan Kecamatan Sumber Wringin serta umumnya tersebar Kabupaten Bondowoso.

4. Input

Tersedianya dana Rp. 1.125.000.000,-

5. Output

Meningkatnya kualitas jalan 1.500 m.

6. Outcome


7. SKPD yang melaksanakan:

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso

JJ. Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1. Latar Belakang

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dibidang 1. Infrastruktur prasarana serta sarana dasar pekerjaan umum; 2. Khususnya dibidang jalan dan jembatan serta prasarana dasar permukiman/air bersih dan air limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kelancaran aksesibilitas perekonomian dan permukiman sehat. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta peningkatan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat yang mendukung program
pelaksanaan gerakan Botanik di Kabupaten Bondowoso yang tidak mencemari lingkungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Tujuan
Tercapainya pembangunan peningkatan pelayanan air bersih.

3. Sasaran
Tersebar di 3 lokasi khususnya yaitu Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, Desa Taal Kecamatan Tapen dan Kecamatan Sumber Wringin serta umumnya tersebar di Kabupaten Bondowoso.

4. Input
Tersedianya dana Rp. 600.000.000,-

5. Output
Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih sebanyak 3 lokasi.

6. Outcome
Terlayaninya/terpenuhinya penduduk akan kebutuhan air bersih.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso

KK.Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

1. Latar Belakang
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dibidang 1. Infrastruktur prasarana serta sarana dasar pekerjaan umum; 2. Khususnya dibidang jalan dan jembatan serta prasarana dasar permukiman/air bersih dan air limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kelancaran aksesibilitas perekonomian dan permukiman sehat. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta peningkatan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat yang mendukung program pelaksanaan gerakan Botanik di Kabupaten Bondowoso yang tidak mencemari lingkungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Tujuan
Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana air limbah.

3. Sasaran
Tersebar di 3 lokasi khususnya yaitu Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, Desa Taal Kecamatan Tapen dan Kecamatan Sumber Wringin serta umumnya tersebar Kabupaten Bondowoso.

4. Input
Tersedianya dana Rp. 475.000.000,-

5. Output
Terbangunnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dan sanitasi masyarakat sebanyak 4 unit.
6. **Outcome**
Meningkatnya lingkungan yang sehat yang tidak mengganggu lingkungan pertanian.
Pelaksanaan kegiatan tahun 2016
Dibangun tersebar di 3 lokasi khususnya yaitu Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, Desa Taal Kecamatan Tapen dan Kecamatan Sumber Wringin serta umumnya tersebar di Kabupaten Bondowoso.

7. SKPD yang melaksanakan:
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso.

LL. Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1. Latar Belakang
   a. Potensi sumber daya air Kabupaten Bondowoso yang cukup besar diharapkan mampu menunjang usaha peningkatan luas areal pertanian di Kabupaten Bondowoso dari luas areal lahan pertanian yang ada sekarang yaitu sebesar 36.012ha.

2. Tujuan
Meningkatkan kualitas pembangunan pengairan sebagai penunjang gerakan pertanian organik khususnya di Desa Sukosari Lor, Desa Pecalongan, Desa Tegal Jati Kecamatan Sukosari, Desa Pakisan, Desa Jebung Lor, Desa Jebung Kidul, Desa Gunosari, Desa Trotosari Kecamatan Tlogosari, dan Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin.

3. Sasaran
   a. Meningkatnya luas areal sawah.
   b. Meningkatnya intensitas tanam.
   c. Meningkatnya keandalan air irigasi.

4. Input
Pembangunan sarana prasarana saluran irigasi guna mendukung kegiatan Botani tlahn 2016, diantaranya sebagai berikut:
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Desa</th>
<th>Lokasi Kegiatan</th>
<th>Baku Sawah (Ha)</th>
<th>Tahun Anggaran</th>
<th>Pagu Anggaran (Rp.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Sukosari</td>
<td>Sukosari</td>
<td>Bang/Sal. Sbr.</td>
<td>30</td>
<td>2016</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Lor</td>
<td>Langgar</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pregindri</td>
<td>Bang/Sal. Langsat 3</td>
<td>37</td>
<td>2016</td>
<td>135.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Bd. Tole</td>
<td>19</td>
<td>2016</td>
<td>180.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tegal Jati</td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Taman</td>
<td>9</td>
<td>2016</td>
<td>160.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Pakis A</td>
<td>13</td>
<td>2016</td>
<td>170.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Tole I</td>
<td>45</td>
<td>2016</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Pakis IV</td>
<td>5</td>
<td>2016</td>
<td>145.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Tole III</td>
<td>38</td>
<td>2016</td>
<td>135.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Tlogosari</td>
<td>Pakisan</td>
<td>Bang/Sal. Salak IV</td>
<td>37</td>
<td>2016</td>
<td>150.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Mas II</td>
<td>36</td>
<td>2016</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Pakisan</td>
<td>882</td>
<td>2016</td>
<td>100.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jebung Lor</td>
<td>Bang/Sal. Dw. Agung I</td>
<td>171</td>
<td>2016</td>
<td>190.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jebung Kidul</td>
<td>Bang/Sal. Reisi IV</td>
<td>42</td>
<td>2016</td>
<td>187.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gunoasri</td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Tancak</td>
<td>17</td>
<td>2016</td>
<td>175.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Maron</td>
<td>20</td>
<td>2016</td>
<td>160.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Manis II</td>
<td>11</td>
<td>2016</td>
<td>198.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tretosari</td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Gunung I</td>
<td>34</td>
<td>2016</td>
<td>170.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Sulam</td>
<td>55</td>
<td>2016</td>
<td>165.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Sumber Wringin</td>
<td>Rejoagung</td>
<td>Bang/Sal. Talangrejo</td>
<td>48</td>
<td>2016</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Tengah 2</td>
<td>45</td>
<td>2016</td>
<td>160.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Lunggusari II</td>
<td>30</td>
<td>2016</td>
<td>150.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Tengah</td>
<td>82</td>
<td>2016</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH**: 3.730.000.000

5. **Output**
Terlaksananya Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 3 lokasi guna mengoptimalkasikan produktifitas dan hasil dari pada kegiatan Bondowoso Pertanian Organik.

6. **Outcome**
   a. Peningkatan luas areal sawah.
   b. Peningkatan intensitas tanam.
   c. Ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam.
   d. Pengoptimalisasian kegiatan Botanik.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso.
JJ. Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
1. Latar Belakang
Berdasarkan data Target dan Capaian Kinerja Dinas Pengairan Tahun 2016 yaitu jumlah bendung kondisi rusak sebesar 49 buah dari total 445 buah; jumlah saluran sekunder kondisi rusak sebesar 27.577 m dari total 163.089 m; jumlah saluran tersier kondisi rusak sebesar 166.298 m dari total 421.463 m; jumlah bangunan pelengkapi kondisi rusak sebesar 1.379 buah dari total 4.367 buah; maka diperlukan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana irigasi tersebut agar bisa berfungsi secara lebih optimal.

2. Tujuan
Meningkatkan kualitas kegiatan operasional dan pemeliharaan bidang pengairan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal sebagai penunjang gerakan pertanian organik khususnya di Kecamatan Sukosari, Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Tlogosari.

3. Sasaran
Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi.

4. Input
Pembangunan sarana prasarana saluran irigasi guna mendukung kegiatan Botanik tahun 2016, diantaranya sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kecamatan</th>
<th>Desa</th>
<th>Lokasi Kegiatan</th>
<th>Luas Sawah (Ha)</th>
<th>Tahun Anggaran</th>
<th>Pagu Anggaran (Rp.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Sukosari</td>
<td>Lor</td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Langgar</td>
<td>20</td>
<td>2016</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Reakring</td>
<td>Bang/Sal. Langsat 1</td>
<td>23</td>
<td>2016</td>
<td>187.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tegal Jati</td>
<td>Bang/Sal. Taman 5</td>
<td>4</td>
<td>2016</td>
<td>120.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tlogosari</td>
<td>Pakisan</td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Mas 1</td>
<td>56</td>
<td>2016</td>
<td>150.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jebung Lor</td>
<td>Bang/Sal. Tlagaran</td>
<td>20</td>
<td>2016</td>
<td>155.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jebung Kidul</td>
<td>Bang/Sal. Raiei 1</td>
<td>28</td>
<td>2016</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gunosari</td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Maron</td>
<td>20</td>
<td>2016</td>
<td>160.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Lerek</td>
<td>39</td>
<td>2016</td>
<td>132.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Dulayan</td>
<td>19</td>
<td>2016</td>
<td>130.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Trotosari</td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Gunung 2</td>
<td>40</td>
<td>2016</td>
<td>180.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Gunung 3</td>
<td>25</td>
<td>2016</td>
<td>120.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Gunung 4</td>
<td>34</td>
<td>2016</td>
<td>150.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Sumber Wringin</td>
<td>Rejoagung</td>
<td>Bang/Sal. Lunggsusari 1</td>
<td>16</td>
<td>2016</td>
<td>150.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Sbr. Tengah 1</td>
<td>37</td>
<td>2016</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bang/Sal. Puloagung</td>
<td>12</td>
<td>2016</td>
<td>200.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH | 2.174.000.000 |
6. Outcome
a. Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
b. Pemanfaatan Sumber Mata Air dapat dioptimalkan oleh masyarakat disekitar lokasi talud.

7. SKPD yang melaksanakan:
   Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso

IV. BAGIAN PEREKONOMIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
A. Kegiatan Koordinasi Gerakan Bondowoso Pertanian Organik
1. Tujuan
   a. Untuk mengetahui pembuatan pupuk organik oleh petani.
   b. Untuk mengetahui perkembangan penggunaan pupuk organik di lapangan.
   c. Untuk mendapatkan validasi data perkembangan penggunaan pupuk organik.
2. Sasaran
   Kelompok tani dan penyuluh pertanian
3. Input
   a. Tersedia dana untuk pelaksanaan.
   b. Tersedia sarana dan Sumber Daya Manusia.
4. Output
   Terlaksananya koordinasi Gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
5. Outcomes
   Tersedianya data penggunaan pupuk organik.

B. Pengorganisasi
1. Kabupaten
   1. Pengarah I : Bupati Bondowoso;
   2. Pengarah II : Wakil Bupati Bondowoso
   3. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
   5. Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso
   6. Sekretaris I : Kepala Bagian Perekonomian pada
7. Sekretaris II : Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso

   b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;
   c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso;
   d. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso;
   e. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso;
   f. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso;
   g. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso;
   h. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso.

Bidang-Bidang
a. Bidang Pemihinaan dan Pengembangan Sarana Produksi Pertanian Organik (Koordinator : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso);

b. Bidang Sosialisasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Organik (Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso);

c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian Organik (Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso);


Tugas Tim Koordinasi Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan peran dari kelompok tani dalam penyediaan bahan baku pupuk organik.

b. Peningkatan pengawasan produk, utamanya labelisasi dan kandungan pupuk organik.
c. Penyebaran dan alih teknologi pertanian organik dengan pengenalan teknologi dan sistem budidaya pertanian.
d. Penyusunan Sistem Prosedur Operasional (SPO) pertanian organik.
e. Pendampingan sistem produksi pertanian organik bagi kelompok tani.
f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dengan perusahaan dalam rangka pengembangan pemasaran produk pertanian organik.
g. Pelaksanaan pameran produk pertanian organik.
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pertanian organik.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana Produksi Pertanian Organik mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a. Melakukan pembinaan kandang koloni untuk tersedianya bahan baku.
b. Meningkatkan peran dari kelompok tani dalam penyediaan bahan baku pupuk organik setengah jadi.
c. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana untuk penampungan bahan baku pupuk organik secara bertahap (tiga tahap).
d. Melakukan pembinaan kelompok tani ke arah kualitas bahan baku setengah jadi.
e. Melakukan pembinaan standarisasi dimulai dari bahan baku peningkatan produk pupuk dan pestisida organik.
f. Meningkatkan pengawasan produk utamanya labelisasi dan kandungan pupuk organik.
g. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana penampungan urine ternak.
h. Melaksanakan pembinaan produksi pupuk organik, yang terdiri dari:
   1) Sertifikasi produk pupuk.
   2) Peningkatan kualitas row material.
   3) Jenis pupuk (bokashi/kompos, butiran/granuler)
   4) Prosedur pembuatan pupuk organik.
   5) Kapasitas produksi.
i. Melaksanakan pembinaan rancang bangun alat pengolahan produksi, peralatan pengolahan pupuk organik, mekanisasi pertanian, pengolahan paska panen dan packaging/labeling hasil produksi.
j. Memberikan fasilitasi kemudahan perijinan industri.
k. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
l. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
m. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.

Bidang Sosialisasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Organik Bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a. Sosialisasi penggunaan pupuk organik berupa petak percontohan / demonstrasi, ceramah, diskusi dan pertemuan massal serta pertemuan kelompok.
b. Penyebaran dan alih teknologi pertanian organik dengan pengenalan teknologi dan sistem budidaya pertanian dengan input luar yang rendah.
c. Pengembangan sistem budidaya pertanian organik dalam bentuk kluster dan sentra pertanian organik.
d. Sosialisasi penyusunan SPO (Sistem Prosedur Operasional) pertanian organik.
e. Fasilitasi uji laboratorium bagi produk pertanian organik.
f. Pelatihan-pelatihan sistem pertanian organik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (baik indoor maupun outdoor) berbentuk klasikal, fieldtrip, dan lain-lain.
g. Pendampingan sistem produksi pertanian organik bagi kelompok tani.
h. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kelompok tani binaan terhadap teknik pembuatan pupuk organik.
i. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan budidayan tanaman kehutanan dan perkebunan.
j. Sekolah Lapang (SL) kelompok tani bidang kehutanan dan perkebunan.
k. Demplot areal tanaman organik, demplot areal kopi organik, demplot areal wana farm.
l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
m. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
n. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.

Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian Organik mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a. Melaksanakan upaya fasilitasi kemitraan dengan perusahaan menengah/besar dalam rangka pengembangan pemasaran produk pertanian organik.
b. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan perkoperasian dalam pengembangan pemasaran produk pertanian organik.
c. Melaksanakan upaya revitalisasi fungsi pasar daerah, pasar desa di Kabupaten Bondowoso dalam rangka mendukung pemasaran produk pertanian organik.
d. Mendorong terlaksananya apresiasi dan perlindungan terhadap bahan pangan organik melalui pembangunan pasar spesifik dan pasar lelang lokal.
e. melaksanakan pameran produk pertanian organik baik di tingkat lokal/regional, nasional, maupun internasional.
f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
g. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
h. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Gerakan Bondowoso Pertanian Organik.

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a. Melaksanakan publikasi pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
b. Menghimpun dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.
d. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan gerakan Bondowoso Pertanian Organik.

2. Kecamatan

Untuk meningkatkan koordinasi antara Kabupaten dengan Kecamatan perlu dibentuk Pos Simpul Koordinasi (Posko) Kecamatan dalam mendukung Gerakan Bondowoso Pertanian Organik. Susunan Tim Posko Kecamatan adalah sebagai berikut:

Ketua : Camat
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
Anggota :
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Petugas Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan
3. Mantri Pertanian (Petugas Pengolah Data Statistik Pertanian di Kecamatan)
4. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
5. Petugas Kehutanan Lapangan (PKL) Dishutbun
6. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)
7. Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan (POPT)
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Tugas Pokok dan Fungsi dari Posko Kecamatan adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan gerakan botanik di tingkat kecamatan;
2. Mengkoordinasikan gerakan botanik dengan desa;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi gerakan botanik di tingkat kecamatan;

3. Desa

Untuk meningkatkan koordinasi antara Kecamatan dengan Desa perlu dibentuk Posko Desa dalam mendukung Gerakan Bondowoso Pertanian Organik. Susunan Tim Posko Desa adalah sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa
Sekretaris I : Sekretaris Desa
Sekretaris II : Penyuluh Pertanian
Anggota :
1. Kaur Pembangunan
2. Juru Pengairan
3. Ketua Gapoktan

Tugas Pokok dan Fungsi dari Posko Desa adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan gerakan botanik di tingkat desa;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi gerakan botanik di tingkat desa;

C. Indikator Kinerja

1. Keluaran (Output)
   Terlaksananya kegiatan gerakan Bondowoso Pertanian Organik di 209 Desa dan 10 Kelurahan di 23 Kecamatan.
2. Hasil (Outcome)
Masyarakat/petani di 209 Desa dan 10 Kecamatan menggunakan pupuk organik.

3. Manfaat (Benefit)
   Meningkatnya kandungan bahan organik tanah.

4. Dampak (Impact)
   Meningkatkan produktivitas komoditas pertanian.

D. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

   Monitoring dan evaluasi pelaporan Gerakan Bondowoso Pertanian Organik dilaksanakan setiap bulan di tingkat desa yang dibuat oleh Sekretaris Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa selaku Ketua Posko Desa disampaikan kepada Camat selaku Ketua Posko Kecamatan dengan tindasan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

   Monitoring dan evaluasi pelaporan Gerakan Bondowoso Pertanian Organik dilaksanakan setiap bulan di tingkat kecamatan, dibuat oleh Sekretaris Kecamatan dan ditandatangani oleh Camat setempat selaku ketua Posko kecamatan disampaikan kepada Bupati Bondowoso dengan tindasan kepada Kepala SKPD Teknis terkait.

   Kriteria lahan yang dilaporkan menggunakan pupuk organik adalah sebagai berikut:

   1. Pupuk organik granuler dengan dosis: 500 kg/ha
   2. Pupuk organik curah dengan dosis: 1.000 kg/ha

V. PENUTUP


Pelaksanaan kegiatan Botanik 2015agar dapat dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Kinerja Gerakan Botanik yang telah dilakukan menunjukkan hasil optimal, disisi lain masih ada hal-hal yang menunjukkan kenyataan kurang optimal dan membutuhkan perhatian kita bersama. Hal itu perlu dimaklumi karena pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi dimensi waktu, ekonomi, dan sosial budaya.

Pelaksanaan Gerakan Botanik dan hasil-hasilnya yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (stakeholders) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan tugas dan kompetensi masing-masing SKPD, sehingga seluruh program yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridlo-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat Kabupaten Bondowoso yang kita cintai.

BUPATI BONDOWOSO,

[Signature]

AMIN SAID HUSNI

51